



# PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024

## DI TENGAH PERSAINGAN POLITIK PEMILU NASIONAL

Penyusun:

Drs. Prayudi, MSi

Haris Yonathan Sibuea, SH, MH

Debora Sanur Lindawaty, SIP, MSi

Aryo Wasisto, MSi

Ziyad Falahi, MSi

### LATAR BELAKANG

Pilkada 2024 pasca Pemilu Serentak memunculkan beberapa polemik yang berpotensi berdampak pada prinsip demokrasi.

### TUJUAN

Mendalami permasalahan Pilkada Serentak 2024, yang berkaitan dengan isu jadwal, potensi konflik, beban penyelenggara.

### LOKASI PENELITIAN

Kota Semarang & Kota Samarinda

### HASIL

**Urgensi Perubahan Jadwal Pilkada:** Meskipun beberapa pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, menganggap perubahan jadwal memiliki dampak positif dalam menghindari masa jabatan pejabat sementara yang terlalu lama, namun terdapat juga pandangan negatif terutama dari kalangan akademisi.

**Potensi Konflik Kepentingan:** Terdapat potensi konflik kepentingan antara Pejabat Sementara dengan partai politik dan kandidat, khususnya di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Hal ini membutuhkan kajian mendalam untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik yang mungkin timbul.

**Kesiapan Netralitas Aparat Pemerintahan:** Kesiapan netralitas aparat pemerintahan, baik sipil, militer, maupun kepolisian, menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Langkah-langkah preventif dan pengawasan diperlukan untuk memastikan netralitas tersebut terjaga.

### HASIL

**Potensi Penggunaan Politik Uang:** Faktor-faktor seperti persaingan politik yang ketat, rendahnya tingkat pendidikan politik, dan kurangnya kesadaran hukum dan etika politik dapat memfasilitasi praktik politik uang.

**Potensi Sengketa Pilkada:** Terdapat potensi sengketa dalam penyelenggaraan Pilkada, baik antara peserta maupun dengan penyelenggara. Faktor-faktor seperti permasalahan administrasi kepemiluan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadi penyebab utama potensi sengketa.

**Dampak Kesenjangan Pilkada:** Kesenjangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 memiliki dampak yang luas, termasuk pada aspek aparatur birokrasi, penyelenggara pemilu, dan pemilih. Upaya-upaya untuk menjaga netralitas aparat, mengurangi beban kerja penyelenggara, mencegah politik uang, dan mengantisipasi sengketa perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan yang adil, transparan, dan demokratis.

### REKOMENDASI

Diperlukan evaluasi mendalam terhadap urgensi perubahan jadwal Pilkada dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak terkait. Langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat netralitas aparat pemerintahan, sosialisasi aturan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas. Selain itu, perlu dilakukan upaya yang lebih kuat untuk mengawasi dan mencegah praktik politik uang, meningkatkan kesadaran hukum dan etika politik, serta memperkuat regulasi terkait dengan persyaratan pencalonan dan penegakan hukum. Penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan diri menghadapi beban kerja yang tinggi dan memotivasi partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya memilih dan kampanye yang mempromosikan kesadaran hukum.